



Menelisik Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan APBD 2025 untuk Penanganan Banjir di DKI Jakarta

Adelia Rismayani^{1*}, Laeli Nur Khanifah², Dhiya Fathiyatul Aulia³, Revaldy Putra Razwa⁴

¹⁻⁴Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: adelyaas1856@gmail.com^{1*}, khanifah92@untirta.ac.id², diyafathia77@gmail.com³, revaldy3112@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Raya Palka KM.03, Kabupaten Serang, Banten

Korespondensi penulis: adelyaas1856@gmail.com

Abstract: This study aims to evaluate the transparency and effectiveness of the use of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in flood management in DKI Jakarta Province. Although the provincial government has allocated a large budget, the problem of flooding is still an annual issue that has not been resolved. Using a qualitative case study approach and George C. Edward III's policy implementation theory as an analytical tool, this study examines four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that policy implementation faces various obstacles such as communication with minimal public participation. Limited technical and human resources, implementer caution due to bureaucratic pressure, and weak integration between agencies. This study concludes that the problem of flooding in Jakarta is not only related to technical aspects, but is also a reflection of the suboptimal regional financial governance and sustainable and accountable public policy implementation system.

Keywords: APBD, flood, DKI Jakarta, policy implementation, financial

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dalam penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar, permasalahan banjir masih menjadi isu tahunan yang belum terselesaikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis, penelitian ini mengkaji empat variabel kunci, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai kendala seperti komunikasi yang minim partisipasi publik. Keterbatasan sumber daya teknis dan manusia, kehati-hatian pelaksana akibat tekanan birokrasi, serta lemahnya integrasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari belum optimalnya tata kelola keuangan daerah dan sistem implementasi kebijakan publik yang berkelanjutan dan akuntabel.

Kata kunci: APBD, banjir, DKI Jakarta, implementasi kebijakan, tata kelola keuangan

1. LATAR BELAKANG

Jumlah bencana alam di Indonesia diantaranya banjir, meningkat sebagai akibat dari perubahan iklim (Klipper et al., 2021). Salah satu bencana yang paling mengerikan adalah banjir. Terkhusus di kota besar seperti Jakarta, karena berimbas kepada banyak orang, termasuk kerugian material karena genangan banjir, kerusakan harta benda, dan penyakit karena daerah yang terdampak kehilangan sanitasi (Riyanto et al., 2022). Sebelumnya definisi bencana dikutip melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, ialah sederet peristiwa yang mengancam bahkan mengganggu kehidupan masyarakat, diakibatkan oleh baik faktor alam atau non alam bahkan faktor manusia sekalipun sampai mengakibatkan

manusia menjadi korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian materil. Kemudian definisi banjir yang diutarakan oleh Hewlett (1982), yakni genangan atau aliran air yang menimbulkan kerugian ekonomi bahkan merenggut korban jiwa (Balahanti et al., 2023).

Bahasa sederhana nya ialah sungai yang debit air meningkat sampai batas maksimal lalu meluap ke wilayah sekitaran sungai. Bukan hanya sebatas sungai saja melainkan juga saluran air di perumahan yang meluap juga dimaknai sebagai banjir, artinya banjir adalah air yang meluap dari segala bentuk tempat penampungan air. Seringkali dilanda segala bentuk bencana karena Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana baik dari alam maupun non alam (Sunarya, D & Sutoyo, E. 2023). Dari total jumlah 38 provinsi, 8 diantaranya menjadi provinsi dengan bencana banjir terbanyak di Indonesia. Kemudian menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 7 November 2024, banjir menduduki peringkat kejadian bencana alam terbanyak yakni 849 kejadian (Perdana, Ridha Kusuma. 2024). Total bencana alam di Tanah Air sebanyak 1.705 kejadian, jumlah bencana banjir tersebut setara dengan 49,8% dari keseluruhan total bencana alam.



Gambar 1. Petugas BPBD DKI Jakarta Menyisir Lokasi Banjir

Sumber: WARTAKOTALive.com (2025)

Bencana acapkali hanya ditangani secara parsial oleh pemerintah bahkan dengan pendekatan tanggap darurat. Setiap daerah di Indonesia melalui pemerintah daerah, mempunyai strategi masing-masing untuk penanggulangan bencana. Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki sederet proyek untuk penanganan banjir, namun buruknya sampai saat ini banjir masih sering terjadi dikala intensitas hujan tinggi atau bahkan rendah sekalipun. Dipicu oleh perubahan iklim dan pembangunan yang pesat, Daerah Khusus Jakarta berpotensi bencana banjir dan bencana hidrometeorologis lain yang cukup tinggi (Taryana et al., 2022). Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan beberapa cara untuk menghadapi banjir. diantaranya pemulihan kawasan hulu, membangun bendungan, normalisasi dan pengerukan sungai, pembuatan sodetan, hingga sumur resapan (Izan, Khaerul. 2025).



Gambar 2. Alat Berat Mengeruk Kali Ciliwung

Sumber: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (2025)

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menangani banjir. Untuk tahun 2025, pemprov Jakarta mengalirkan dana untuk penanganan banjir mencapai 5,6 triliun, ini merupakan salah satu anggaran terbesar di 2025. Anggota hingga Wakil Ketua DPRD DKJ berpendapat perihal anggaran tersebut, mereka meminta pemprov benar-benar serius untuk mencari cara penanggulangan banjir dengan memanfaatkan anggaran yang ada (Fajriadi, Alif Ilham. 2024). Kemudian banjir di Jakarta memengaruhi masyarakat secara sosial dan ekonomi. Banjir menyebabkan kerugian materil yang signifikan secara ekonomi, termasuk kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta bangunan dan fasilitas umum lainnya (Ramdhani, Jabbar. 2025).

Selain terganggunya aktivitas perdagangan dan industri, juga menyebabkan kerugian ekonomi yang tertuju pada banyaknya bisnis berhenti beroperasi lalu mengalami kerugian finansial. Banjir menyebabkan kemacetan yang mengganggu pergerakan orang dan barang. Perkiraan banjir di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 2,1 triliun setiap tahunnya (Al Hamasy, Atiek, I. 2024). Dari segi sosial, banjir mencemari air dan menyebarkan penyakit seperti malaria dan diare. Banjir juga mengakibatkan pengungsian massal, kerusakan rumah, dan hilangnya mata pencaharian, itu semua dapat menyebabkan trauma psikologis dan masalah sosial lainnya. Sektor sosial juga mengalami kerugian, termasuk penurunan layanan kesehatan, peningkatan kebutuhan pendidikan, dan peningkatan kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak (Wastec, International. 2025)

Tabel 1. Data APBD Penanganan Banjir Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Nominal Anggaran
2025	3,90 T
2024	2,89 T
2023	3,25 T
2022	25,2 M
2021	3,99 T

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (2025)

Berbicara soal urgensi penelitian, melihat pada judul yang dipilih menandakan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD tahun 2025 DKI Jakarta, terutama dalam hal mengatasi masalah banjir yang terus-menerus di ibu kota. Adanya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan karena curah hujan yang meningkat, alih fungsi lahan, dan infrastruktur drainase yang kurang efektif. Untuk mengetahui sejauh mana alokasi dan penggunaan APBD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu menunjukkan seberapa bertanggung jawab pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan anggaran. Dari segi kontribusi keilmuan, penelitian ini dapat memperkaya diskusi tata kelola keuangan daerah dan kebijakan publik dan memberikan landasan empiris untuk membangun model pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Selain itu, hasilnya dapat digunakan oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong praktik tata kelola anggaran yang lebih berpartisipasi dan berorientasi pada hasil.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan merupakan tahap strategis yang berlangsung setelah kebijakan dirumuskan. Pada tahap ini, kebijakan mulai diterapkan dan diuji, baik dari segi substansi maupun efektivitas pelaksanaannya (Dunn, 1994). Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Turhındayani, 2020), implementasi melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai salah satu tahap paling krusial dalam siklus kebijakan, (Turhındayani, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang sangat vital, bahkan bisa dikatakan lebih penting dibandingkan proses perumusan kebijakannya sendiri.

Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sekadar wacana atau rencana indah yang tersimpan dalam dokumen. Teori Implementasi Kebijakan Goerge C Edwards III

pertama kali diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul *"Implementation: The Linkage between Policy and Public Administration"* (1980). Buku ini menekankan pentingnya hubungan antara proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yakni sejumlah hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai perhatian utama Edwards III.

Teori ini muncul sebagai respons terhadap pandangan sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek pembuatan kebijakan dan pengabaian pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan (Permatasari, 2020). Sebelumnya, para ahli lebih menekankan pada analisis tentang bagaimana kebijakan dibuat dan disusun, namun Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan sama pentingnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian kami yang membahas Evaluasi Penggunaan Anggaran Penanganan Banjir Di DKI Jakarta: Telaah Terhadap Transparansi Dan Efektivitas Tata Kelola Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi penggunaan anggaran penanganan banjir di DKI Jakarta.

Teori ini dipilih karena mampu menguraikan secara sistematis bagaimana proses kebijakan public dalam hal ini, penggunaan anggaran daerah dijalankan di tingkat implementasi, serta mengapa hasilnya kerap kali tidak sesuai dengan harapan. Dalam konteks penanganan banjir, pemerintah DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran yang besar setiap tahunnya. Namun, banjir masih menjadi persoalan yang berulang dan menimbulkan kerugian. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran maupun transparansi tata kelolanya. Melalui empat variabel utama yang dikemukakan oleh Edward III, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.

Misalnya, apakah informasi anggaran tersampaikan secara terbuka kepada publik (komunikasi), apakah pelaksana memiliki sumber daya yang memadai dan kompeten, apakah pelaksana memiliki kemauan dan komitmen untuk menjalankan program (disposisi), serta apakah struktur birokrasi mendukung koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi seberapa besar dana yang digunakan, tetapi juga bagaimana dana tersebut diimplementasikan secara nyata, siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya, dan apa saja hambatan yang muncul. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kelemahan implementasi, serta menjadi

dasar untuk mendorong perbaikan kebijakan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan penanganan banjir.

Edward III membagi indikator implementasi kebijakan menjadi empat, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, yaitu mengenai komunikasi yang efektif sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup penyampaian informasi, kejelasan isi pesan, serta memastikan bahwa pelaksana kebijakan memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
- 2) Sumber Daya, menjelaskan tentang ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana maupun non-dana, sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini meliputi pembiayaan, tenaga kerja, perlengkapan, serta dukungan teknologi.
- 3) Disposisi, mengacu pada sikap dan dorongan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ini mencakup kemauan, etos kerja, serta komitmen atau kesetiaan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
- 4) Struktur Birokrasi, meliputi susunan organisasi, jenjang kewenangan, serta tata prosedur yang berlaku dalam lembaga atau instansi yang bertugas melaksanakan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus oleh Creswell (2015). Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama yang bersifat kompleks dan kontekstual. Dalam konteks ini, studi kasus difokuskan pada penggunaan anggaran penanggulangan banjir di DKI Jakarta sebagai unit analisis utama. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah diimplementasikan dalam program penanggulangan banjir. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data secara rinci melalui dokumen anggaran, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan observasi terhadap kebijakan dan implementasinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan efektif dalam mengatasi masalah banjir yang menjadi isu krusial di Jakarta.

Penelitian ini fokus pada efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini akan melihat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana serta bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran untuk program penanggulangan banjir. Prosedur pengadaan yang transparan, sistem pelaporan publik untuk penggunaan anggaran, dan pemeriksaan terhadap keterbukaan informasi anggaran akan digunakan untuk menilai transparansi. Di sisi lain, pencapaian tujuan program pengendalian banjir, konsistensi antara rencana anggaran dan pengeluaran aktual, dan dampak aktual dari pengeluaran pemerintah dalam mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di DKI Jakarta, semuanya akan digunakan untuk menilai seberapa baik manajemen keuangan bekerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta sebagai ibukota Indonesia terletak di bagian barat laut Pulau Jawa berperan untuk pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara. Tak heran jika berpergian kesana akan melihat berbagai gedung pemerintahan nasional maupun internasional. Sebagai pusat ekonomi, tidak ada jam istirahat untuk aktivitas masyarakat di kota ini, mereka dari matahari terbit hingga matahari terbenam masih terus melakukan aktivitas di kota metropolitan ini. Maka Kota Jakarta mendapat predikat sebagai kota terbesar bahkan terpadat di negara ini. Apabila dilihat lewat data *jakarta.bps.go.id* luas wilayah Jakarta sekitar 661,52 km² (lautan: 6.997,5 km², dengan populasi penduduk berjumlah 10.672.100 jiwa pada data 2023. Luas wilayah di angka ratusan ribu kemudian dengan populasi 10 juta lebih maka dapat dibayangkan sepadat apa Kota Jakarta di tiap wilayahnya. Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian timur berdampingan dengan Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya kepadatan Kota Jakarta akan bertambah dengan kedatangan masyarakat di penyangga Ibukota yang beraktivitas untuk bekerja atau berlibur (Kumparan.com, 2024).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk di Provinsi DKI Jakarta
Kepulauan Seribu	28.523
Jakarta Selatan	2.235.606
Jakarta Timur	3.079.618
Jakarta Pusat	1.049.314
Jakarta Barat	2.470.054
Jakarta Utara	1.808.985
DKI Jakarta	10.672.100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023).

Salah satu jenis ancaman nonmiliter terhadap keamanan nasional adalah bencana. Bencana adalah salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa aman suatu negara dalam membangun ketahanan nasional. Bencana mengancam kehidupan sosial masyarakat dominan, yang pada gilirannya mengancam keamanan nasional. Meningkatnya tingkat bencana yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat (Setio et al., 2022)

Dengan penduduk Jakarta yang sangat padat ditambah dengan masyarakat dari wilayah penyangga, menimbulkan permasalahan yang kian waktu tak kunjung terselesaikan yakni banjir. Di setiap tahunnya bahkan kepemimpinan gubernur silih berganti permasalahan ini tak kunjung usai. Banjir merupakan sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh alam sendiri atau ulah manusia, perlu diketahui Jakarta berlokasi di Pulau Jawa yang dilintasi cincin api (*ring of fire*) yang menjadikan sebagai wilayah rawan bencana alam. Selain karena dilintasi cincin api tetapi lokasi Jakarta di wilayah dataran rendah dengan bermacam aliran sungai menyebabkan rawan akan terjadinya banjir. Sungai atau kali di Jakarta berperan sebagai hilir, artinya hulu sungai atau kali tersebut berada di luar Jakarta yakni Kota Bogor. (Al Hamasy, Atiek I, 2024). Dilansir melalui jakarta.bps.go.id sejumlah sungai atau kali yang melintasi Jakarta, total sebanyak 17 dengan panjang dan luas berbeda-beda. Setiap hujan membasahi kota metropolitan ini debit air di sungai atau kali naik dengan sendirinya, hal ini bukan karena air hujan yang turun di Jakarta melainkan arus air yang berasal dari Kota Bogor sebagai hilir. Oleh karenanya Jakarta selalu mengalami bencana alam banjir yang tentu menghambat aktivitas seluruh warga.

Tabel 2. Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta

Sungai/Kanal	Panjang	Luas Area	Peruntukan
Ciliwung	21660	515600	Usaha Perkotaan
Kali Grogol	21600	367325	Perikanan
Sunter	21290	540900	Usaha Perkotaan
Krukut	18370	206340	Air Baku Air Minum
Cakung	18100	181000	Usaha Perkotaan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021).

Berbagai faktor penyebab banjir (selain alam) harus segera diselesaikan, seperti permasalahan sampah rumah tangga atau industri yang seharusnya dibuang pada tempatnya melainkan masih banyak masyarakat yang tidak peduli lingkungan dengan membuang langsung ke sungai atau selokan. Akan lebih baik lagi jikalau ada sampah yang dapat didaur ulang, maka itu akan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Tetapi permasalahan nya bukan persoalan sampah saja, seperti dijelaskan di awal sungai atau kali di Jakarta berperan sebagai hilir artinya hulu berada di luar Jakarta, maka banjir ini disebabkan karena adanya kiriman volume air dari hulu yang sangat deras sehingga Jakarta sulit untuk menampung volume air kiriman tersebut.

Kondisi ini harus dicarikan solusi antara dua pemerintah baik Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bogor, hal ini memerlukan sinergi yang optimal antar kedua pemerintahan ini untuk dapat memecahkan permasalahan yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat. Penanganan banjir ini selalu menjadi pekerjaan rutin bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai cara dan solusi telah dilakukan untuk setidaknya mengurangi debit air di daerah yang selalu banjir. Apabila kita kilas balik ke tahun 2024 untuk membahas seberapa jauh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan segala hal guna menangani banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air telah melakukan semua upaya yang mungkin untuk menangani banjir. Ini termasuk membangun infrastruktur, menempatkan petugas di lokasi strategis, dan membuat skema penanganan banjir yang terintegrasi. (Hasyim, Irsyan. 2025).

Hal yang dimaksud dari pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana fisik untuk membantu hal teknis dalam mengurangi atau menahan debit air contoh seperti pompa, membangun waduk, situ, embung, bahkan pintu air. Para petugas dari berbagai elemen dinas yang ada di DKI Jakarta terjun langsung untuk mengurangi debit air yang menggenangi jalanan ibukota. Kemudian pemerintah juga berupaya untuk mengeruk sungai atau kali guna menambah atau memperdalam volume air supaya tidak cepat meluap, selain itu juga

merelokasi rumah-rumah semi permanen yang ada di bantaran sungai karena ini salah satu penyebab luas sungai menyempit.

Namun dari sekian banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah banjir, tetap saja ada kekurangan yang ada pada pengerjaan tersebut. Contohnya sumur resapan yang dikerjakan untuk menampung air banjir yang menggenangi jalanan ibukota, ini dinilai kurang efektif dalam pengimplementasian karena membuat jalanan menjadi bergelombang lalu membahayakan pengguna jalan. Kemudian saat merelokasi warga dari bantaran sungai atau kali sempat mendapatkan penolakan, karena warga enggan dipindahkan ke rumah susun yang disiapkan oleh pemerintah, hal ini karena mereka merasa akan jauh dari tempat mereka mengais rezeki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut defisit ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir mencapai angka Rp2,1 triliun per tahun. Banjir yang terus menerus terjadi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, sebab Jakarta merupakan pusat perekonomian yang terus bergerak tiap waktu nya (Izan, Khaerul. 2024).

Dengan kehadiran wajah pemimpin DKI Jakarta yang dilantik pada 20 Februari 2025, yakni Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk periode 2025-2030 (Sofa, Amira . 2025). Seluruh warga Jakarta menaruh harapan besar kepada pemimpin yang baru agar bisa memecahkan segenap permasalahan yang masih terulang di Jakarta, salah satunya ialah banjir. Dilihat dari nilai APBD DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun, angka tersebut akan dipecah untuk dibagi ke berbagai sektor salah satunya penanganan banjir. Dari nilai APBD 2025 tersebut Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran sebanyak 3,9 triliun untuk mengatasi banjir. Bahkan digadang-gadang proyek pengendalian banjir Jakarta akan dimasukkan ke daftar indikatif Proyek Strategis Nasional 2025-2029, ini menandakan bahwa ada keseriusan dari pemerintah provinsi atau nasional untuk menyelesaikan banjir (Arief Valdy, Teuku Muhammad. 2025).

Secara garis besar, proyek-proyek yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kasus penanganan banjir ini antara melakukan inovasi terbaru atau melanjutkan proyek yang sudah direncanakan tahun sebelumnya atau gubernur yang lalu. Melalui Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta pencegahan banjir segera dilakukan dengan berbagai cara, contohnya memperlebar sungai atau kali, memanfaatkan waduk untuk penampungan air sementara, pengelolaan sampah berkelanjutan. Dari banyaknya program penanganan banjir jikalau dalam pelaksanaan nya masih kurang maka hasilnya akan percuma saja. Menurut pandangan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah, beliau menegaskan untuk

penanganan banjir merupakan salah satu program kerja prioritas, kemudian dalam memilih konsultan harus selektif agar hasilnya akan sempurna (Humas BPK DKI Jakarta, 2024).

Potret Akuntabilitas Pemerintah DKI Jakarta dalam Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap strategis yang berlangsung setelah kebijakan dirumuskan. Pada tahap ini, kebijakan mulai diterapkan dan diuji, baik dari segi substansi maupun efektivitas pelaksanaannya (Dunn, 1994). Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Turhindayani, 2020), implementasi melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu pengelolaan anggaran mengenai penanggulangan banjir, terutama dalam hal efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Nurhayati (2020), yang mengeksplorasi secara mendalam permasalahan pengalokasian anggaran penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Studi ini mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan data kerentanan bencana sebagai dasar, seperti data sebaran wilayah rawan banjir, curah hujan tahunan, dan kondisi saluran drainase. Akibatnya, sejumlah proyek fisik seperti pembangunan saluran air dan normalisasi sungai tidak menyasar daerah yang paling membutuhkan. Selain itu, proses penganggaran dinilai kurang melibatkan pemangku kepentingan teknis dan masyarakat terdampak, sehingga aspirasi warga di tingkat akar rumput seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa koordinasi antarlembaga, khususnya antara Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi yang kuat. Kondisi ini memicu terjadinya tumpang tindih program, keterlambatan pelaksanaan proyek, dan lemahnya pengawasan penggunaan dana. Nurhayati juga menyoroti proses evaluasi pelaksanaan program yang masih bersifat administratif dan tidak mencerminkan dampak nyata, seperti penurunan volume genangan atau frekuensi banjir di wilayah terdampak.

Kurangnya transparansi dalam laporan realisasi anggaran dan pencapaian indikator kinerja menyulitkan publik untuk memantau proses implementasi kebijakan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan dan komunikasi yang terbuka dan menyeluruh, pengelolaan anggaran dalam penanggulangan banjir akan sulit untuk

mencapai efektivitas secara keseluruhan. Selain itu, Retno Dwi Siswanto & Anggraeny Puspaningtyas (2023) menemukan kurangnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir di Gresik, yang berdampak pada efektivitas tindakan yang diambil. Setio et al. (2022) juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.

Dalam berita terbaru, kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun per tahun (Al Hamasy, Atiek Ishlahiyah, 2024), sementara Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun untuk penanganan banjir di tahun 2025 (Fajriadi, Alif Ilham, 2024). Artikel dari *Wastec International* (2025) menganalisis penyebab berulangnya masalah banjir dan menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah banjir secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk perencanaan anggaran yang berbasis data, koordinasi yang baik antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat.

Mengenai permasalahan penanganan banjir, pemerintah DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran yang besar setiap tahunnya. Namun, banjir masih menjadi persoalan yang berulang dan menimbulkan kerugian. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran maupun transparansi tata kelolanya. Melalui empat indikator utama yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menyatakan bahwa salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Di sini, komunikasi mencakup lebih dari sekadar penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman bersama, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaksana di lapangan dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun secara efektif dalam pengelolaan anggaran APBD 2025 untuk penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta (Nuraini et al., 2025).

Dalam manajemen banjir kejelasan komunikasi sangat penting, terutama ketika menyampaikan tujuan kebijakan, alokasi dan penggunaan anggaran, dan prosedur operasi standar. Program dapat terhambat jika perintah pemerintah daerah disampaikan dengan cara yang tidak jelas atau membingungkan bagi pelaksana teknis dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Oleh karena itu, agar semua pemangku kepentingan dapat memahami pernyataan kebijakan secara utuh, diperlukan pola

komunikasi yang terencana, terstruktur, dan didukung oleh data (Efriza & Tri Rachmanto Supena, 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ir. Bun Joi Phiau, anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan program masih relatif rendah dan biasanya terjadi secara satu arah. Beberapa warga yang tinggal di dekat bantaran Sungai Ciliwung mengakui bahwa mereka tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pembicaraan atau pengambilan keputusan mengenai rencana relokasi atau inisiatif pengendalian banjir. Mereka berpendapat bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak memiliki dialog yang terbuka dan hanya memberikan informasi yang bias. *“Kami hanya diberitahu bahwa kami harus pindah, menurut seorang warga. Prosedur, waktu, dan karakteristik rumah baru tidak dijelaskan secara menyeluruh”*. Strategi ini pada akhirnya ditolak oleh beberapa warga karena kurangnya transparansi dalam komunikasi dan pengucilan warga. Keengganan warga untuk pindah ke rumah susun yang telah disiapkan pemerintah menjadi bukti penolakan tersebut. Mengingat banyak dari mereka yang sudah lama bermukim di daerah tersebut, mereka menganggap pemindahan tersebut sebagai pemaksaan yang tidak mengindahkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis mereka.

Komunikasi di lapangan merupakan kesulitan yang signifikan, seperti yang diakui oleh pejabat Dinas Perumahan. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan melalui pengurus RT dan RW, namun tidak semua warga langsung menerimanya. Ia mengklaim bahwa penolakan warga disebabkan oleh pemahaman mereka yang kurang lengkap mengenai tujuan jangka panjang dan keuntungan relokasi. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa komunikasi tidak selalu berjalan mulus ketika mengimplementasikan kebijakan. Penyampaian pesan yang konsisten, penggunaan media komunikasi yang tepat, dan kurangnya pelibatan warga sebagai pihak yang terkena dampak langsung masih menjadi masalah. Warga cenderung menolak kebijakan dan memiliki keraguan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik sebagai akibat dari kurangnya komunikasi dua arah.

Dengan demikian, melibatkan masyarakat hanya pada tahap implementasi saja tidaklah cukup. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kebutuhan dan keadaan masyarakat, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sejak awal, termasuk dalam mengidentifikasi solusi dan memilih metode relokasi. Proses relokasi melibatkan unsur sosial dan psikologis selain unsur

teknis. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan pendekatan yang lebih mengedepankan rasa kasih sayang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, hubungan sosial, dan aspek emosional masyarakat yang terkena dampak. Untuk membantu warga menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka, pemerintah juga dapat menawarkan program-program dukungan seperti kegiatan komunitas, bantuan keuangan, atau pengembangan keterampilan.

2. Sumber Daya (*Reasources*)

George C. Edwards III menegaskan, sumber daya merupakan elemen penting yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Dalam konteks ini, sumber daya terdiri dari infrastruktur, informasi, tenaga kerja, dan otoritas yang dibutuhkan selain anggaran. Ketersediaan, alokasi yang adil, dan administrasi yang kompeten dari berbagai sumber daya ini merupakan faktor kunci dalam menentukan seberapa baik anggaran APBD 2025 untuk penanganan banjir di DKI Jakarta diimplementasikan. Anggaran memang penting, namun begitu juga dengan komponen sumber daya manusia (SDM). Kemampuan operator sistem drainase, petugas teknis lapangan, dan personil pemerintah sangat penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan baik berisiko gagal pada tahap implementasi jika tidak memiliki personil yang terlatih dan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang manajerial, teknis, dan pelibatan masyarakat menjadi sangat penting untuk inisiatif pengendalian banjir di Jakarta (Subagiyo, 2018).

Selain itu, salah satu sumber daya yang harus tersedia secara memadai dan dalam kondisi yang dapat digunakan adalah kesiapan peralatan dan infrastruktur teknis, seperti sistem pemantauan banjir, alat berat, dan pompa air. Dalam permasalahan sumber daya air di wilayah DKI Jakarta menjadi semakin rumit, dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menanganinya dengan serius. Hal ini penting karena Jakarta mewakili Indonesia ke seluruh dunia. Oleh karena itu, daripada menangani masalah-masalah yang berbeda ini satu per satu, masalah-masalah tersebut harus ditangani secara komprehensif dan bersama-sama (Harsoyo, 2010).

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya merupakan faktor krusial yang mempengaruhi seberapa baik rencana penanganan banjir yang dibiayai oleh APBD 2025 dapat diimplementasikan di DKI Jakarta. Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, masalah sumber daya masih menghadapi beberapa kesulitan. Meskipun pendanaan untuk proyek-proyek seperti peningkatan sistem drainase,

pembangunan kolam retensi, dan normalisasi sungai telah meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesiapan sumber daya lainnya, termasuk tenaga teknis, alat berat, dan material pendukung, belum dapat mengimbangi ketersediaan dana tersebut.

Kurangnya tenaga ahli dan tenaga lapangan yang memahami kondisi unik daerah rawan banjir merupakan salah satu tantangan terbesar, terutama dalam hal peremajaan saluran dan kanal. Meskipun anggaran tersedia, Dinas SDA menyatakan bahwa kurangnya standar kompetensi sumber daya manusia sering kali membatasi pelaksanaan proyek, yang mengakibatkan penundaan karena kontraktor kesulitan menemukan pekerja yang memenuhi syarat. Namun, Dinas SDA masih memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini, terutama dengan melatih petugas lapangan dan bekerja sama dengan mitra yang memiliki pengetahuan teknis. Untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan data di lapangan, mereka juga menciptakan sistem pemantauan banjir yang terkomputerisasi.

Oleh karena itu, strategi anggaran harus mencakup pendanaan untuk pemeliharaan dan modernisasi infrastruktur. Secara umum, sumber daya menyoroti betapa pentingnya kesiapsiagaan umum untuk membantu pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan dikelola dengan baik sangat penting bagi keberhasilan anggaran APBD 2025 untuk pengendalian banjir di Jakarta. Ketika anggaran yang cukup besar didukung oleh staf yang berkualitas, data yang akurat, dan infrastruktur yang dapat diandalkan, maka kebijakan yang dibuat tidak hanya akan berjalan dengan baik, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

3. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada disposisi atau karakter pelaksana kebijakan, disposisi mengacu pada sifat-sifat utama yang seharusnya dimiliki oleh pelaksana adalah integritas, dedikasi, dan sikap terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga karakter ini sangat krusial karena memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksana suatu kebijakan (Pramudita et al, 2022). Disposisi ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena walaupun aturan dan anggaran sudah tersedia, tanpa adanya kemauan dan pemahaman yang kuat, dari pelaksana, kebijakan seringkali gagal dijalankan secara optimal.

Mengenai permasalahan banjir di Jakarta yang menggunakan APBD sebagai sumber dana, wawancara dengan pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) menunjukkan bahwa para pelaksana di lapangan sebenarnya memiliki kesadaran dan komitmen tinggi. Salah satu narasumber SDA menyatakan *“Sebenarnya bukan gak mau gerak cepat, tapi kadang kita nungguin proses administrasinya lama, udah musim hujan, laporan harus lengkap dulu baru bisa turun ke lapangan. Dan kalau kita jalan duluan nanti dikira locat dari prosedur kan repot juga”*. Ketatnya proses administrasi dan pengawasan juga menjadi kendala yang membuat mereka harus berhati-hati dalam bertindak.

Sementara itu, dari sisi legislatif anggota komisi D DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan kritis terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia menyampaikan mengenai, *“Tiap tahun kita udah setujuin anggaran buat penanganan banjir, nilainya gak kecil loh, tapi pas kita cek lagi serapannya rendah”*. Dari wawancara ini terlihat adanya gap antara niat baik dan komitmen pelaksana di lapangan dengan tekanan birokrasi yang membuat mereka harus bekerja secara hati-hati dan formalistik. Sementara Legislatif mengharapkan progress dan realisasi yang cepat, pelaksana lebih banyak dihadapkan pada proses administratif yang ketat dan resiko pengawasan yang tinggi.

Dengan demikian, disposisi pelaksana bukan hanya soal kemauan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kerja dan budaya birokrasi yang ada. Situasi ini mencerminkan disposisi menurut Edward III yang menekankan bahwa kemauan dan sikap pelaksana bukan hanya terbentuk oleh faktor individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sistem prosedural, dan budaya organisasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan public (Puspitasari, 2023). Bahkan ketika pelaksana kebijakan telah memiliki sumber daya yang memadai dan menunjukkan kemauan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tetap berpotensi gagal apabila didukung oleh struktur birokrasi yang efektif.

Struktur birokrasi mencakup kejelasan garis wewenang, mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta sistem koordinasi antarinstansi yang terlibat. Mengenai permasalahan ini, struktur birokrasi melibatkan banyak aktor, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga dinas perhubungan. Meskipun setiap Lembaga tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi hambatan birokratis. Salah satu pejabat dari Dinas SDA mengungkapkan, *“Sebenarnya SOP kita udah ada semua, termasuk buat alat berat sama pompa. Tapi kalau lagi darurat, misalnya banjir besar, ngirim alat itu harus tetap pakai surat permohonan dulu, dan itu makan waktu.”* Ia juga menambahkan, *“Kita punya aplikasi buat pelaporan, kayak JAKI, tapi itu belum terintegrasi sama semua dinas. Jadi kadang-kadang data kita nggak nyambung.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, *“Masalahnya tuh kadang bukan di alatnya, tapi di koordinasinya. Tiap dinas jalan sendiri-sendiri, kayak ada ego sektoral. Harusnya kalau udah masuk musim hujan, koordinasi antar dinas itu satu komando, jangan nunggu perintah berjenjang yang ribet.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Jakarta masih belum cukup adaptif terhadap situasi darurat. Hambatan utama terletak pada sistem koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang belum terintegrasi secara real-time.

Hal ini tercermin dalam beberapa kasus, seperti keterlambatan pengoperasian pompa air di Jakarta Barat pada Maret 2024, yang menyebabkan genangan air sulit dikendalikan karena prosedur administrasi pengiriman alat berat yang belum selesai (Anggrainy, 2025). Menurut Edward struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kaku seperti ini justru menghambat keberhasilan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, reformasi sistem birokrasi dan integrasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, terutama ketika berhadapan dengan situasi darurat seperti banjir.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan penggunaan APBD 2025 untuk penanganan banjir di DKI Jakarta masih belum menunjukkan tingkat efektivitas dan transparansi yang diharapkan. Meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran

yang sangat besar, banjir tetap menjadi persoalan tahunan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai program yang dijalankan seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, hingga relokasi warga bantaran sungai masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan teknis, penerimaan masyarakat, serta sistem koordinasi antarinstansi. Faktor struktural seperti padatnya penduduk, kondisi geografis Jakarta yang merupakan wilayah hilir, serta kiriman air dari wilayah penyangga memperparah persoalan banjir. Di sisi lain, implementasi kebijakan pengendalian banjir belum sepenuhnya menjawab akar masalah, terutama terkait perilaku masyarakat, sistem drainase yang belum memadai, dan lemahnya pengawasan penggunaan anggaran. Melalui pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, terungkap bahwa komunikasi pemerintah yang belum partisipatif, keterbatasan sumber daya pelaksana, sikap birokrasi yang kaku, serta struktur organisasi yang belum terintegrasi menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan. Dengan demikian, persoalan banjir di DKI Jakarta bukan hanya soal teknis penanganan air, tetapi juga merupakan cerminan dari kompleksitas tata kelola anggaran, kualitas kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBD dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pola komunikasi dua arah yang lebih partisipatif dengan masyarakat sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan hanya pada tahap sosialisasi atau implementasi. Keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kebutuhan dan kondisi di lapangan, serta mengurangi penolakan terhadap program seperti relokasi warga. Kedua, meskipun anggaran untuk penanganan banjir sudah besar, perlu ada peningkatan dalam ketersediaan dan kualitas sumber daya pendukung lainnya, terutama tenaga ahli dan tenaga lapangan yang memahami kondisi daerah rawan banjir, serta ketersediaan alat berat dan material pendukung yang siap pakai. Pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajerial, teknis, dan pelibatan masyarakat menjadi krusial untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan. Ketiga, perlu adanya reformasi dalam sistem birokrasi yang cenderung kaku dan formalistik. Disposisi pelaksana yang sebenarnya memiliki komitmen tinggi sering terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan prosedur dan peningkatan fleksibilitas, terutama dalam situasi darurat banjir, agar pelaksana dapat bertindak cepat tanpa mengabaikan

akuntabilitas. Terakhir, integrasi sistem koordinasi antarinstansi (Dinas Sumber Daya Air, BPBD, Dinas Perhubungan, dan lainnya) harus ditingkatkan secara real-time untuk mengatasi ego sektoral dan mempercepat respons dalam penanganan banjir. Dengan demikian, permasalahan banjir di DKI Jakarta dapat diatasi secara lebih efektif melalui tata kelola anggaran yang transparan, kebijakan publik yang responsif, dan partisipasi masyarakat yang optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, F., & Vitaloka, D. (2018). Strategi kerjasama antar daerah dalam penanganan sumber daya air (studi kasus Sungai Ciliwung). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.898>
- Al Hamasy, A. I. (2024, Mei 29). 5.170 bencana mendera Jakarta dalam empat tahun terakhir. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/29/jakarta-dilanda-lebih-dari-5000-bencana-dalam-empat-tahun-terakhir>
- Al Hamasy, A. I. (2024, Mei 30). Dampak banjir Jakarta timbulkan kerugian Rp 2,1 triliun per tahun. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/30/dampak-banjir-jakarta-timbulkan-kerugian-rp-21-triliun-per-tahun>
- Arief, V. T. M. (2025, Maret 7). Pengendalian banjir Jakarta diusulkan masuk PSN 2025–2029. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2025/03/07/152343926/pengendalian-banjir-jakarta-diusulkan-masuk-psn-2025-2029>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Panjang dan luas sungai/kanal menurut peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQyIzE=/panjang-dan-luas-sungai-kanal-menurut-peruntukannya-di-provinsi-dki-jakarta-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMY/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-html>
- Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). Analisis tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 11, 69–79. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/download/51447/44169/121650>
- Efiza, & Supena, T. R. (2021). Proses politik dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22>

- Fajriadi, A. I. (2024, Februari 1). Anggaran penanganan banjir Jakarta 2025 capai Rp 5,6 triliun. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/anggaran-penanganan-banjir-jakarta-2025-capai-rp-5-6-triliun-1186755>
- Harsoyo, B. (2010). Teknik pemanenan air hujan (rain water harvesting) sebagai alternatif upaya penyelamatan sumberdaya air di wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 11(2), 29. <https://doi.org/10.29122/jstmc.v11i2.2183>
- Hasyim, I. (2025, Mei 2). Antisipasi banjir Jakarta, Pemprov DKI telah bangun 17,17 kilometer tanggul Sungai Ciliwung di tahun 2024. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/antisipasi-banjir-jakarta-pemprov-dki-telah-bangun-17-17-kilometer-tanggul-sungai-ciliwung-di-tahun-2024-1200445>
- Humas BPK DKI Jakarta. (2024). Tahun 2025, prioritaskan penanganan banjir. <https://jakarta.bpk.go.id/tahun-2025-prioritaskan-penanganan-banjir/>
- Izan, K. (2024). Kerugian akibat banjir di DKI Jakarta Rp2,1 triliun. *Antaranews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4128282/kerugian-akibat-banjir-di-dki-jakarta-rp21-triliun>
- Izan, K. (2025). Banjir Jakarta dan berbagai upaya mengatasinya. *Antaranews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4631233/banjir-jakarta-dan-berbagai-upaya-mengatasinya>
- Jabbar Sangaji, M. S., Priyanti Noor, P. Z., & Navasari, S. (2021). Analisis kebijakan Jakarta Smart City menuju masyarakat madani. *Journal of Government Insight*, 1(2), 62–75. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i2.306>
- Klipper, I. G., Zipf, A., & Lautenbach, S. (2021). Flood impact assessment on road network and healthcare access at the example of Jakarta, Indonesia. *AGILE: GIScience Series*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.5194/agile-giss-2-4-2021>
- Kumparan.com. (2024). Arti DKI Jakarta, sejarah nama Jakarta, dan makna lambang daerahnya. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-dki-jakarta-sejarah-nama-jakarta-dan-makna-lambang-daerahnya-21DyqsyETAd/2>
- Nuraini, C. F., Rahman, A., & Jakarta, U. M. (2025). Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata kelola pemerintahan desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12. [file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf]
- Perdana, R. K. (2024). Data 8 provinsi dengan jumlah kejadian banjir terbanyak di Indonesia per 7 November 2024. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-8-provinsi-dengan-jumlah-kejadian-banjir-terbanyak-di-indonesia-per-7-november-2024>
- Puspitasari, & Suyeno, S. (2023). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar). *Jurnal Respon Publik*, 17(13), 90–100.

- Ramdhani, J. (2025). Kerugian banjir Jabodetabek Rp 1,69 T, Bekasi Raya paling terdampak. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7846115/kerugian-banjir-jabodetabek-rp-1-69-t-bekasi-raya-paling-terdampak>
- Retno Dwi Siswanto, & Anggraeny Puspaningtyas. (2023). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan mitigasi banjir di Kabupaten Gresik. *Policy and Maritime Review*, 2(1), 21–31. <https://doi.org/10.30649/pmr.v2i1.42>
- Riyanto, I., Rizkinia, M., Arief, R., & Sudiana, D. (2022). Three-dimensional convolutional neural network on multi-temporal synthetic aperture radar images for urban flood potential mapping in Jakarta. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/app12031679>
- Setio, Y., Dewa, P. I., Kerta, K., Sarpono, W., & Widodo, P. (2022). Analisis upaya mitigasi Pemerintah Jakarta Utara untuk menanggulangi bencana banjir rob guna mendukung keamanan nasional. *Jurnal Kebijakan dan Keamanan Nasional*, 6(4), 6952–6956.
- Sofa, A. (2025). Jakarta sambut gubernur dan wakil gubernur baru. *Smartcity Jakarta*. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/jakarta-sambut-gubernur-dan-wakil-gubernur-baru-dki-jakarta/>
- Sunarya, D., & Sutoyo, E. (2023). Strategi penanganan banjir di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng. *SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya*, 1(1), 40–45.
- Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bekti, H. (2022). Analisis kesiapsiagaan bencana banjir di Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 302. [file:///Users/macbook/Downloads/literatur%201.pdf]
- Tiwa, R. C., Pasomah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 339–350.
- Wastec International. (2025). Banjir Jakarta: Kenapa masalah ini terus terjadi dan apa yang bisa dilakukan? <https://wastecinternational.com/banjir-jakarta-kenapa-masalah-ini-terus-terjadi-dan-apa-yang-bisa-dilakukan/>